



---

**PENGARUH IDIOSINKRATIK SHINZO ABE TERHADAP *GENDER*  
MAINSTREAMING DALAM IMPLEMENTASI *WOMENOMICS***

**Ayu Tiara Karel Bua', Reni Windiani**

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Kota Semarang Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

*Womenomics is a structural reform step carried out during the second term of Shinzo Abe's government. This is surprising because Abe, who is considered conservative, dared to initiate policies that contrary to Japanese culture. This research aims to explain how Shinzo Abe's personality and leadership type have influenced womenomics policies and gender mainstreaming. This research uses qualitative research methods and data collection is done through literature study, from books, journal, articles, and websites. The result shows that Abe's idiosyncratic factors and leadership type had a significant influence on womenomics policy making. Family background, life experiences, relationships with political elites playing an important role in shaping Abe's mindset and interest on gender issues. Womenomics is one of the productions of knowledge owned by Shinzo Abe. Then the results of the analysis of Abe's leadership type shows that Abe is a conciliator type who emphasizes cooperation in achieving goals of womenomics through gender mainstreaming. This research suggest the further research on gender in Japan places more emphasis on the legacy of the womenomics policy to the new Prime Minister of Japan, Fumio Kishida.*

***Keywords:*** *Shinzo Abe, womenomics, idiosyncratic, individual, gender mainstreaming*

**PENDAHULUAN**

Pada tahun 2013, Abe merevolusi sistem ekonomi Jepang yang mana diharapkan revolusi tersebut dapat mendorong kenaikan tingkat partisipasi dari berbagai elemen masyarakat Jepang untuk berperan sebagai tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Kebijakan tersebut mengejutkan masyarakat Jepang sebab Abe memiliki latar belakang yang konservatif. Melalui

kebijakan *womenomics*, Abe menjanjikan suatu keadaan “*all women can shine*” (Galli, 2016). Keberhasilan implementasi *womenomics* terlihat dari sejak tahun 2013 hingga 2019 tercatat bahwa persentase jumlah pekerja wanita pada usia 15 tahun keatas mengalami peningkatan dari 49% hingga mencapai 53%, melebihi pertumbuhan rata-rata pekerja wanita pada negara-negara OECD (The World Bank, 2021).

Selain berperan sebagai kebijakan domestik, *womenomics* juga berperan sebagai fitur utama kebijakan luar negeri Jepang. Bagi Abe, partisipasi perempuan dalam segala sektor dapat memperbaiki citra Jepang di mata internasional. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2013, Abe menekankan bahwa partisipasi perempuan dalam perekonomian dapat memberikan keuntungan bagi negara berkembang, khususnya negara-negara di Afrika (Chanlett-Avery & Nelson, 2014). Abe juga akan memberikan bantuan pembangunan resmi (ODA) lebih dari \$3 miliar dengan menargetkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan; perawatan medis untuk wanita; serta penyelesaian konflik yang terkait dengan perempuan (UN News, 2013). Sementara itu AS dan Jepang juga bekerjasama dalam menginisiasi program pendidikan bagi anak-anak perempuan di dunia yang dilakukan pada pertemuan antara ibu negara AS yaitu Michelle Obama, Duta Besar AS untuk Jepang yaitu Caroline Kennedy, dan ibu negara Jepang yaitu Abe Akie (Sekiguchi, 2015).

Penelitian ini akan berfokus pada peran perempuan pada tingkat internasional yang akan disebut sebagai *gender mainstreaming*. *Gender mainstreaming* dalam *womenomics* yang dibentuk pada pemerintahan Shinzo Abe melatarbelakangi penulisan ini untuk menelusuri dan menganalisis penyebab Shinzo Abe yang dinilai konservatif namun berani untuk menginisiasi sebuah kebijakan *womenomics* sekaligus menjadikannya fitur kebijakan luar negeri Jepang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepribadian dan tipe kepemimpinan Shinzo Abe memengaruhi pembuatan kebijakan *womenomics* dan *gender mainstreaming*. Berangkat dari konsep faktor idiosinkratik menurut Margaret Hermann (1980), idiosinkratik adalah perilaku individu dapat dianalisa melalui berbagai faktor seperti karakter kepribadian yang dihasilkan oleh latar belakang serta pengalaman hidup individu. Proses penganalisaan tersebut dilakukan dengan cara analisis kognitif dan psikologis yang berhubungan satu dengan lainnya dalam mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan. Adapun aspek idiosinkratik yang

dianalisis adalah latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, pengalaman, hubungan dengan elit politik, dan produksi pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin.

Pada penelitian yang ditulis oleh Liv Coleman (2017) menjelaskan bahwa tekanan internasional mendesak pemerintah Jepang agar segera mengubah politik domestik dan kebijakan luar negerinya sesuai dengan standar internasional, sehingga *womenomics* juga digunakan sebagai fitur kebijakan luar negeri Jepang. Namun demikian, penelitian ini mencoba untuk menganalisis melalui sudut pandang yang berbeda yaitu melalui pendekatan analisis idiosinkratik dalam melihat faktor apa yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan *womenomics* dan implementasinya sebagai *gender mainstreaming* secara global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka atau *library research* untuk mengumpulkan bukti-bukti data sekunder yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode *content analysis* atau analisis data dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks dan dapat direplikasi (ditiru) dengan memanfaatkan konteksnya (Krippendorff, 1991).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Idiosinkratik Shinzo Abe**

#### **Latar Belakang Keluarga**

Shinzo Abe berasal dari keluarga yang aktif dalam politik. Latar belakang keluarga kedua orang tuanya adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam pemerintahan di Jepang. Ibunya yaitu Yoko Kishi, putri dari Nobosuke Kishi, seorang Mantan Perdana Menteri Jepang pada tahun 1957 hingga 1960. Sedangkan ayahnya, Shintaro Abe adalah anak dari Kan Abe, seorang politikus yang memiliki jabatan dalam DPR tahun 1937 hingga 1946. Shintaro Abe, ayah Shinzo Abe adalah seorang Menteri Luar Negeri Jepang dan anggota LDP terkemuka. Pada tahun 1987, Shinzo Abe menikah dengan Akie Matsuzaki. Akie memiliki gelar master dari Universitas Rikky (Harris, 2020). Akie dikenal sebagai perempuan yang sangat menghargai perbedaan dan menentang adanya diskriminasi kaum minoritas. Setelah menjadi ibu negara Jepang, Akie telah aktif mendukung kemajuan perempuan di dalam masyarakat dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan sekolah (*Terakoya*) di Myanmar. Akie mengabdikan dirinya pada bidang pendidikan, perempuan, dan pertukaran internasional. Menurut Akie, masyarakat yang

ideal tercipta ketika laki-laki dan perempuan saling menghormati dan bersinar bersama-sama. Lalu, setelah dikeluarkannya kebijakan tentang *womenomics* pada tahun 2014, Akie pun mendirikan “*UZU no Gakko*” yang merupakan sekolah untuk menyelenggarakan diskusi panel diantara para ahli serta tempat untuk melakukan kegiatan demi mendukung perempuan yang ingin membuat kemajuan pada berbagai bidang (Foreign Policy Magazine, n.d.). Inisiasi dari pembentukan sekolah tersebut merupakan salah satu dukungan terhadap isu gender di Jepang dengan memanfaatkan posisinya sebagai isteri dari Perdana Menteri.

Secara tidak langsung, Akie Abe telah mempengaruhi suaminya yaitu Shinzo Abe untuk lebih peduli pada isu gender. Akie adalah pendukung utama dari kebijakan *womenomics*. Ia berpendapat bahwa dukungan bagi perempuan untuk bangkit dan bertahan di lingkungan kerjanya akan sangat penting bagi perkembangan perekonomian di Jepang. Hubungan Akie Abe dan Shinzo Abe menjadi sebuah contoh bagi masyarakat Jepang tentang bagaimana kesetaraan gender dapat tercapai. Peran dari seorang suami sangat penting untuk memberikan fleksibilitas bagi isterinya untuk dapat “bersinar”. Dalam rumah tangga mereka, Shinzo Abe pun tetap melakukan bagiannya dalam pekerjaan rumah tangga serta bertugas untuk membuang sampah (Foreign Policy Magazine, n.d.).

Hasil analisis latar belakang keluarga, dapat disimpulkan bahwa pola pikir, perilaku, tindakan atau keputusan seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh keluarga dimana Abe bertumbuh serta berproses. Walaupun Abe berasal dari keluarga yang kurang peduli dengan isu gender, akan tetapi ia memperoleh sudut pandang yang berbeda tentang gender setelah menikah dengan Akie Abe. Hal tersebut menghasilkan sesuatu yang positif dimana Abe di dalam periode pemerintahannya yang kedua, ia menginisiasi kebijakan *womenomics* demi membangkitkan kembali para perempuan untuk bersinar dalam semua aspek kehidupan.

### **Latar Belakang Pendidikan**

Shinzo Abe mengenyam pendidikan dari tingkah sekolah dasar hingga tingkat universitas di Seikei Gakuen School System. Abe mengambil jurusan ilmu politik di Universitas Seikei dan lulus pada tahun 1977. Setelah lulus, ia meninggalkan Jepang dan pergi ke California untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggrisnya sebelum mendaftar program pascasarjana. Setelah menghabiskan tahun 1977 dengan belajar bahasa Inggris, pada Januari 1978 Abe mendaftarkan

dirinya di USC Sol Price School of Public Policy di California Selatan. Namun ia hanya menjalani tiga semester lalu kembali ke Jepang dan tidak mengambil gelarnya (Harris, 2020, p. 32).

Berdasarkan latar belakang pendidikan Shinzo Abe, penulis menganalisis bahwa pendidikan Abe tidak memiliki relevansi dengan kepeduliannya terhadap isu gender. Hal tersebut dibuktikan bahwa selama Abe mengenyam pendidikan di Universitas Seikei, ia belum mendapatkan pelajaran tentang gender maupun teori feminisme. Studi tentang gender pertama kali diperkenalkan di universitas-universitas Jepang pada tahun 1974. Lalu tahun 1977, *International Society for Gender Studies* baru terbentuk. Dan buku sosiologi pertama yang memakai kata gender pada judulnya terbit pada tahun 1989 (Sato, 2021). Sedangkan Abe telah lulus dari Universitas Seikei pada tahun 1977. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Abe tentang isu gender belum terbentuk saat ia berada dibangku perkuliahan.

### **Pengalaman Hidup**

Semasa Abe berada di Amerika untuk melanjutkan studinya pada tahun 1977, Abe melihat perbedaan yang terjadi dalam masyarakat Amerika dan Jepang. Berdasarkan pidato yang disampaikan dalam pertemuan WAW! (World Assembly for Women) tahun 2017 di Jepang, Abe mengutarakan bahwa ia terkejut melihat kehadiran para wanita Amerika berada dalam lingkaran bisnis dan dengan percaya diri membuktikan bahwa mereka mampu menjadi pesaing yang sepadan dengan pria (Website Resmi Perdana Menteri Jepang, 2017).

Berdasarkan pengalaman hidup Shinzo Abe, penulis menganalisis bahwa salah satu hal yang memicu perubahan interest Abe terhadap gender adalah ketika ia berada di Amerika. Perbedaan budaya Jepang dan Amerika dalam memperlakukan perempuan dan pria sangat berbeda. Keaktifan perempuan dalam dunia kerja di AS membuat negaranya semakin maju dalam segala bidang. Sedangkan di Jepang partisipasi perempuan sangat terbatas dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat kuat. Oleh karena itu, Shinzo Abe bertekad untuk membuat sebuah kebijakan politik yang dapat mewujudkan kesetaraan gender di Jepang dan disamping itu dapat kembali menumbuhkan perekonomian Jepang yang mengalami stagnasi.

### **Hubungan dengan Elit Politik**

Sebelum mengawali jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang menggantikan Junichiro Koizumi, Abe bekerja kepada Koizumi sebagai kepala sekretaris kabinet. Koizumi adalah seorang

Perdana Menteri Jepang tahun 2001-2006 dan sekaligus *Headquarters for the Promotion of Gender Equality*. Pada saat itu Jepang sudah mendapatkan tekanan-tekanan internasional karena Jepang sebagai negara maju dianggap belum bisa menangani masalah ketimpangan gender. Sehingga akhirnya mantan Perdana Menteri Koizumi beserta jajarannya membuat berbagai kebijakan untuk memperbaiki keadaan Jepang, salah satunya dengan mengadakan “*Gender Equality Forum*” dan mengumpulkan berbagai sektor dalam masyarakat (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2006).

Sebagai bagian dari perjuangan Koizumi selama menjabat sebagai Perdana Menteri, Shinzo Abe memiliki hubungan yang sangat baik dengan Koizumi. Abe bahkan diberikan jabatan kepala sekretaris kabinet pada tahun 2005 karena kinerjanya yang dinilai memuaskan oleh Koizumi. Abe menjadi Perdana Menteri tahun 2006-2007 dan kembali menjabat pada tahun 2012-2020. Dalam beberapa kesempatan, Abe melanjutkan perjuangan dari pemimpin sebelumnya dan mengambil langkah yang sama dalam reformasi ekonomi dan hubungan diplomatik demi menguatkan reputasi Jepang di mata internasional, salah satunya dengan membuat kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, yaitu *womenomics*. Kebijakan *womenomics* merupakan pengemasan ulang ide, target, dan rencana reformasi yang telah ada sebelumnya (Hasunuma, 2015). Dengan kata lain bahwa pencapaian Abe untuk membuat kebijakan *Womenomics* merupakan bagian dari proses panjang pemimpin dekade sebelumnya dalam menangani isu gender di Jepang.

Selain hubungannya dengan Junichiro Koizumi, Shinzo Abe juga memiliki hubungan yang erat dengan salah satu kelompok yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Jepang, yaitu Nippon Kaigi atau *Japan Conference*. Nippon Kaigi adalah kelompok ultranasionalis terbesar di Jepang yang terbentuk dari peleburan dua organisasi berpengaruh di Jepang yaitu *Nippon o Mamoru Kai* yaitu kelompok nasionalis dari para pemuka agama dan kelompok-kelompok agama, dan *Nippon o Mamoru Kokumin Kaigi* yang merupakan kelompok para nasionalis dari kalangan politisi, pebisnis, dan para intelektual (Shibuichi, 2017).

Sejak pembentukan Nippon Kaigi, kelompok ini telah mencanangkan tujuannya untuk melakukan perubahan terhadap sejarah Jepang, salah satunya adalah tidak mau mengakui isu terkait *Comfort Women* dan menolak segala gerakan kesetaraan gender. Nippon Kaigi menganggap kesetaraan gender memiliki pengaruh berbahaya pada keluarga karena bersifat individualistis dan condong kepada kepribadian Barat (Shibuichi, 2017). Hal ini menjadi alasan

kegagalan *womenomics* yang tidak dapat mencapai targetnya hingga saat Abe meninggalkan jabatannya tahun 2020 yang lalu. Kurangnya kesetaraan gender terlihat di kalangan legislator, pejabat senior, dan manajer. Jepang yang konservatif dibawah pemerintahan Abe tidak berbuat banyak untuk melawan pandangan tradisional tentang perempuan. Gagasan Shinzo Abe yang masih konservatif dipengaruhi oleh Nippon Kaigi. Ia tidak banyak mengubah pandangannya terkait kesetaraan gender, tetapi juga tidak secara terbuka menentang kebijakan kesetaraan gender sebab hal itu melindungi dirinya dari lawan politik sayap kiri (Oshimo & Cogan, 2022).

Hubungan Abe dengan elit politik lainnya yaitu dengan Partai LDP (Liberal Democratic Party) yang merupakan partai politik pertama Abe sejak terjun ke dunia politik, bahkan semua keluarga Abe yang bekerja sebagai politisi berasal dari partai ini. Partai LDP adalah partai konservatif yang paling dominan di Jepang sejak pembentukannya dan memiliki tujuan ingin memperbaiki citra Jepang dengan cara menghapus daftar-daftar kejahatan perang Jepang yang pernah dilakukan di masa lalu seperti *Nanjing Massacre* (pembantaian Nanjing) dan juga *Comfort Women* (Muneo, 2013).

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan dengan elit politik yang telah dibangun oleh Abe dengan pemimpin sebelumnya dapat mempengaruhi kebijakan seperti apa yang tepat untuk diimplementasikan. Dalam hal ini kebijakan *womenomics* adalah hasil dari bagian dari rangkaian ide dan juga rencana reformasi dari Mantan Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi. Namun disamping implementasi dan keagalannya dalam mencapai targetnya, *womenomics* yang dibentuk Abe tidak benar-benar ditujukan untuk mencapai kemajuan nyata tentang kesetaraan gender, sebaliknya hanya sekadar kebijakan atraktif dengan tujuan mengangkat posisi Jepang yang terlihat suram dalam indeks kesetaraan gender secara global.

### **Produksi Pengetahuan yang Dimiliki**

Dalam pertemuan Sidang Umum PBB tahun 2013, Shinzo Abe menyatakan akan menciptakan keadaan “*society in which women can shine*” dalam struktur domestik Jepang dan juga sebagai kebijakan luar negeri Jepang. Dengan mengusung konsep *womenomics*, ia menegaskan bahwa kemajuan perempuan memiliki korelasi langsung dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah negara (UN News, 2013). Selanjutnya pada tahun 2017, Shinzo Abe kembali memberikan pidatonya dalam pertemuan World Assembly for Women (WAW!) yang diadakan di Jepang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah besar wanita yang aktif di seluruh dunia.

Sebagaimana dalam pidatonya Abe menyatakan bahwa sejak implementasi *womenomics*, sekitar 1,5 juta lebih perempuan di Jepang bergabung dalam angkatan kerja. “*It is possible to change society*”, Abe meyakini bahwa perubahan dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat apabila dapat saling bahu-membahu mengatasi masalah yang terjadi. Sebagai Perdana Menteri Jepang pada saat itu, Abe bertekad agar pemerintahannya untuk dapat terus mendukung kemajuan perempuan dan hendak memperluas jaringan di seluruh dunia untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Hal ini dilakukan agar setiap negara mampu menyelesaikan kemiskinan dan berbagai masalah lain yang dihadapi dunia.

Berdasarkan pidato-pidato yang disampaikan Shinzo Abe pada beberapa pertemuan formal, penulis menganalisis bahwa interpretasi personal Abe tentang kesetaraan gender cukup luas. Dibuktikan melalui pernyataan Abe yaitu tercapainya kesetaraan gender di sebuah negara berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Seperti halnya Jepang yang dikenal dengan negara patriarki, Shinzo Abe mencoba untuk mengubah nasib negaranya melalui pembukaan kesempatan kerja bagi perempuan melalui *womenomics*. *Womenomics* merupakan salah satu produksi pengetahuan yang dimiliki oleh Abe dan diperluas lagi dengan melakukan *gender mainstreaming* terhadap negara-negara lain. Dengan tercapainya tujuan untuk membangkitkan tenaga kerja perempuan, maka diyakini hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

## **B. Tipe Kepemimpinan Shinzo Abe**

### **Nationalism**

Hermann (1980) mendefinisikan nasionalisme merupakan pandangan seseorang untuk memposisikan negara adalah nomor satu. Seorang pemimpin dengan nasionalisme yang tinggi akan lebih mengutamakan identitas dan kehormatan negaranya. Dalam tulisannya, kata nasionalisme dianggap masih sangat tradisional sebab masih seputar bangsa dan negara (Hermann, 1980). Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Hermann maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin dengan nasionalisme yang tinggi digolongkan dalam tipe pemimpin yang agresif, sedangkan pemimpin dengan nasionalisme yang rendah digolongkan dalam tipe konsiliatori.

Hubungan nasionalisme dengan tipe pemimpin agresif atau konsiliatori yang ditulis oleh Hermann sayangnya dianggap sangat tradisional dan sudah tidak relevan lagi dengan hubungan

internasional kontemporer, sebab dalam hubungan internasional kontemporer, seorang pemimpin tidak dapat serta merta memaksakan kebijakan nasionalismenya dengan cara yang agresif. Untuk mencapai kepentingan negara, pemimpin negara harus dapat memilah-milah kebijakan seperti apa yang harus digunakan agar dapat memberikan keuntungan dua belah pihak. Dengan berkembangnya isu-isu internasional, nasionalisme seorang pemimpin negara pun mengalami perkembangan.

Salah satu perkembangan isu internasional saat ini yang harus diberantas adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang, namun juga masih terjadi di negara maju seperti Jepang. Untuk itu, semenjak Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode yang kedua, salah satu kebijakan ekstrimnya adalah *womenomics* dengan slogannya '*all women can shine*'. Kebijakan *womenomics* adalah perwujudan dari rasa nasionalisme Shinzo Abe. Menurut Abe, rasa nasionalisme muncul dari lokal dan tradisional sehingga mencintai, merawat dan melindungi sejarah, budaya, dan tradisi adalah dasar dari nasionalisme. Abe menyebutkan dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2006, bahwa nasionalisme Jepang adalah '*open nationalism*' dan bukan ideologi berpikiran sempit atau '*narrow-minded*' (Saaler, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa definisi nasionalisme menurut Hermann tidak relevan lagi dengan nasionalisme Abe. Abe memiliki nasionalisme yang tinggi yang terbukti melalui patriotismenya yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara, namun disamping itu juga ia adalah tipe pemimpin konsiliatori yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai kepentingan nasional dan keuntungan dua belah pihak. Sehingga dalam kasus ini, kerjasama untuk mencapai keuntungan dua belah pihak yaitu *gender mainstreaming* yang menjadi kebijakan luar negeri Jepang dilatarbelakangi oleh rasa nasionalisme Abe yang tinggi. Di satu sisi *gender mainstreaming* merupakan langkah dalam mempromosikan citra Jepang atau bagian dari mempertahankan kehormatan negara, sementara disisi lain *gender mainstreaming* juga memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang dalam memerangi diskriminasi gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, khususnya sebagai tenaga kerja di sektor perekonomian.

### **Belief in Own Ability to Control**

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Hermann (1980), ia mengartikan keyakinan pada kemampuan sendiri adalah pandangan bahwa pemimpin merasa memiliki kemampuan untuk

menciptakan atau mengendalikan situasi. Dalam hal ini, seorang pemimpin percaya bahwa situasi yang terjadi di dunia internasional berada dibawah kendalinya. Adapun kode operasional karakteristik ini ditunjukkan pada tindakan seseorang bertanggung jawab untuk memulai (inisiatif) atau merencanakan sesuatu. Berdasarkan tipe kepribadian, seorang pemimpin dengan tipe agresif akan mengambil tindakan untuk mengendalikan sebuah keadaan. Sedangkan pemimpin dengan tipe konsiliator cenderung menginginkan skema kerja sama untuk dapat mengatasi suatu kondisi atau keadaan dalam dunia internasional. Dengan kata lain, pemimpin konsiliator hanya sedikit percaya akan kemampuan mereka untuk mengendalikan sebuah peristiwa. Hal ini terbukti dalam pertemuan pemimpin negara atau dikenal dengan *summit diplomacy* mengindikasikan bahwa seorang pemimpin negara memiliki kepercayaan yang rendah pada kemampuan tunggalnya untuk mengontrol suatu keadaan.

Salah satu pemimpin negara yaitu Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, melakukan *gender mainstreaming* untuk mencapai visinya yaitu meningkatkan partisipasi perempuan demi memperbaiki perlambatan ekonomi dan sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi para wanita di negara-negara berkembang. Demi mencapai *goals* tersebut, Abe mengajak pihak lain untuk ikut serta dalam menjalankan visi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Abe hanya sedikit percaya pada kemampuannya untuk mengontrol suatu kondisi. Selain itu, Abe juga menawarkan bantuan untuk mendukung UN Women dalam menangani isu gender. Berikut kutipan teks pidato Shinzo Abe pada pertemuan PBB yang dikutip melalui website resmi Perdana Menteri Jepang:

*“Japan will do everything possible to prevent such crimes against women and to support both materially and psychologically those people who unfortunately become victims of such acts”* (Official Website Perdana Menteri Jepang, 2013).

Pernyataan tersebut sejalan dengan karakteristik tipe konsiliatori yang dalam tindakannya peka dalam isu internasional dan berusaha untuk mencari solusi atas isu internasional serta berusaha untuk menyediakan fasilitas dalam sistem internasional (Hermann, 1980). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shinzo Abe dengan tipe kepemimpinan konsiliatori yang hanya sedikit percaya pada kemampuannya untuk mengontrol terciptanya kesetaraan gender.

### **Need of Affiliation**

Atkinson (1958) mendefinisikan kebutuhan afiliasi adalah sebuah perhatian terhadap bagaimana sebuah hubungan dibangun, dipelihara, dan juga memulihkannya dengan orang lain. Kemudian Margaret Hermann dalam tulisannya (1980) menambahkan bahwa pemimpin yang memiliki kebutuhan akan afiliasi yang tinggi terlihat dari tindakannya yang senang melakukan kerja sama dengan siapa saja. Ia menyadari bahwa manusia saling membutuhkan. Sebuah kerjasama antar aktor internasional dilakukan karena adanya kepentingan yang harus dicapai, baik itu kepentingan nasional maupun kepentingan internasional. Memperjuangkan kepentingan nasional, memperoleh keuntungan strategis, atau untuk menemukan solusi yang dapat diterima secara timbal balik merupakan tujuan dari kebijakan luar negeri (Bakry, t.t., hlm 159).

Kebijakan gender atau yang dikenal dengan ‘*womenomics*’ diterapkan oleh Shinzo Abe sebagai kebijakan luar negeri dengan mengajak organisasi-organisasi internasional yang terkait dengan UN Women dan juga dengan ICC (*International Criminal Court*) untuk mengatasi permasalahan gender yang terjadi selama ini. Kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional membuktikan bahwa Abe “haus” akan afiliasi.

Kebutuhan afiliasi ini dipengaruhi oleh karakter ayahnya selama menjabat sebagai Perdana Menteri yang banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara lain, sehingga dikenal sebagai Perdana Menteri dengan diplomasi globalnya. Selama ayahnya menjabat, Abe bekerja sebagai sekretaris ayahnya dan telah memperoleh banyak wawasan serta pemahaman yang tajam mengenai cara kerja politik Jepang yang kemudian membentuk pola pikir Abe. Pola pikir tersebut kemudian menciptakan gaya pengambilan keputusan Abe khususnya dalam kebijakan luar negeri, seperti melakukan kebijakan *gender mainstreaming*. Dibalik kebijakan *gender mainstreaming* yang dilakukan Abe, sejalan dengan definisi Hermann bahwa pemimpin tipe konsiliator memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi (Hermann, 1980).

### **Conceptual Complexity**

Kompleksitas terhadap konseptual diartikan sebagai cara pandang seseorang dan bagaimana ia mengolahnya menjadi sebuah ide dan pola pikir (Hermann, 1980). Pemimpin yang memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi melihat dunia dari perspektif yang luas, mencari alternatif dan menerima pendapat dari pihak lain, khususnya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada (Hermann, 1980). Hermann juga menyebutkan bahwa pemimpin dengan tipe konsiliatori cenderung memiliki tingkat kompleksitas konseptual yang tinggi.

Analisa tingkat kompleksitas konseptual pada kepemimpinan Shinzo Abe dilihat dari cara menanggapi dan menyelesaikan masalah. Dalam pidatonya di UN General Assembly, Abe menyatakan bahwa untuk mencapai partisipasi wanita sebagai tenaga kerja tidak dapat diatasi dengan cara yang sederhana. Dalam pidatonya ia mengharapkan pendapat dari pihak lain untuk dapat menyelesaikan masalah gender. Lebih lanjut Abe juga menyampaikan bahwa pemerintah Jepang akan bergabung dan bekerja sama dengan AS dan para pemimpin dunia lainnya dengan tujuan menjadikan dunia abad ke-21 sebagai dunia yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan.” (Abe, 2015). Pernyataan yang disampaikan oleh Shinzo Abe menunjukkan bahwa Abe adalah seorang pemimpin dengan tipe konsiliatori yang menekankan kerja sama untuk mewujudkan visi *womenomics* yaitu “*all women can shine*”.

Berdasarkan analisis pidato dan pernyataan yang disampaikan oleh Shinzo Abe, dapat disimpulkan bahwa Abe memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi yang dibuktikan melalui sikap yang mau menerima pendapat dari pihak lain sebagai alternatif dalam menangani masalah gender, khususnya secara global. Kemudian perilaku yang menginginkan kerja sama sebagai solusi dalam mewujudkan dimana perempuan dapat bersinar menunjukkan bahwa Abe merupakan tipe konsiliatori.

### **Distrust to Others**

Hermann (1980) menyatakan bahwa ketidakpercayaan dapat terlihat melalui tindakan seorang pemimpin negara yang menjauhkan dirinya dengan negara lain. Menjauhkan diri dengan negara lain pada umumnya pemimpin ini dikategorikan dalam tipe agresif. Tipe agresif akan berusaha untuk mempertahankan individualitas bangsanya dan memisahkan diri dari negara-negara lain dalam sistem internasional. Ia beranggapan bahwa kontak yang luas dengan negara lain dapat menyebabkan ketergantungan. Dan ketika harus berinteraksi dengan negara lain, ia berharap agar dapat sesuai dengan persyaratan negaranya atau keinginannya (Hermann, 1980).

Interaksi dengan negara lain selalu berlandaskan dengan rasa kepercayaan terhadap satu sama lain. Seperti *gender mainstreaming* yang telah dilakukan oleh Abe, ia membuka dirinya terhadap negara-negara lain dan organisasi internasional untuk bekerja sama. Keterbukaan tersebut membuktikan bahwa Abe adalah pemimpin yang memiliki ketidakpercayaan yang rendah terhadap pihak lain (*low distrust to others*).

## **KESIMPULAN**

Latar belakang Shinzo Abe yang berasal dari keluarga elit politik mendorong Abe untuk menduplikasi kebijakan luar negeri yang dilakukan para pendahulunya dalam keluarga, termasuk ayahnya yang berperan sebagai menteri luar negeri pada masanya. Ayahnya sangat sering melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan negara-negara lain yang kemudian berpengaruh pada pola pikir dan *interest* Abe untuk melakukan kerjasama untuk mewujudkan *gender mainstreaming* saat ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri terlama di Jepang, Abe pada masa pemerintahan yang kedua menerapkan kebijakan *womenomics* pada kebijakan domestik lalu kemudian diadopsi ke dalam kebijakan luar negeri *gender mainstreaming*.

Dibalik kebijakan gender mainstreaming yang dilakukan, karakter personal Abe memainkan peranan penting. Karakteristik individu dianalisa menggunakan konsep idiosinkratik yang dikemukakan oleh oleh Margareth Hermann. Kemudian setelah melakukan analisa tipe kepemimpinan, peneliti menyimpulkan bahwa Shinzo Abe adalah pemimpin dengan tipe konsiliatori yang dibuktikan dalam beberapa poin. Pertama, Abe adalah pemimpin yang memiliki nasionalisme yang tinggi (*high nationalism*) namun *open-minded*. Kedua, Abe menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dalam mengontrol situasi (*little belief in own ability to control*). Ketiga, Abe memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi (*high need of affiliation*). Keempat, Abe memiliki kompleksitas konseptual yang rendah (*low conceptual complexity*). Kelima, Abe memiliki ketidakpercayaan yang rendah terhadap orang lain (*low distrust to others*).

Penelitian pengaruh idiosinkratik Shinzo Abe dalam *gender mainstreaming* melalui *womenomics* diperoleh dari data yang sangat terbatas dan disamping itu juga periode kepemimpinan Abe juga telah berakhir. Sehingga saran penulis untuk penelitian lebih lanjut adalah melakukan penelitian terkait keberlanjutan dari *womenomics* sebagai *gender mainstreaming* di era kepemimpinan Perdana Menteri Jepang yang baru, yaitu Fumio Kishida.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S. serta Ibu Palupi Anggraheni, S.IP, M.A. selaku dosen pembimbing. Kemudian terima kasih kepada Bapak Muhammad Faiq Adi Pratomo, S.IP, M.Sc dan Ibu Anjani Tri Fatharani, S.IP, M.A

selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, S. (2013, September 25). *Unleashing the Power of “Womenomics.”* Wall Street Journal. <http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303759604579091680931293404>
- Abe, S. (2014). *Unleashing the Power of “womenomics.”* The Wall Street Journal.
- Abe, S. (2015). Japan’s vision for a peaceful and healthier world. *The Lancet*, 386(10011), 2367–2369. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01172-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01172-1)
- Abe, S. (Direktur). (2015b). ‘*Vol. 1 Prime Minister Abe Shinzo. #WAWTokyo2015.*’ <https://www.youtube.com/watch?v=YrSX8kWayzI>
- Abe, S. (2015, April 24). When Women Thrive, So Will the World. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2015-04-24/when-women-thrive-so-will-the-world>
- Abe, S. (2015). Japan’s vision for a peaceful and healthier world. *The Lancet*, 386(10011), 2367–2369. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01172-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01172-1)
- Aggestam, Karin, & Rosamond, A. B. (2016). Feminist Foreign Policy in the Making. Dalam *Ethics and International Affairs* (Vol. 3, hlm. 323–334).
- Ahmad, J. (2018). *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Anugerah, S.I.P., M.Si., M.K.P., B. (2016). Faktor Idiosinkratik Pemimpin dalam Perumusan Politik Luar Negeri. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 26 (International Relations, Security, Political Science). [https://www.academia.edu/44420352/Faktor\\_Idiosinkratik\\_Pemimpin\\_dalam\\_Perumusan\\_Politik\\_Luar\\_Negeri](https://www.academia.edu/44420352/Faktor_Idiosinkratik_Pemimpin_dalam_Perumusan_Politik_Luar_Negeri)
- Atkinson, J. W. (1958). *Motives in Fantasy, Action, and Society*. Litton.
- Aulia, B., & Iskandar, K. (2021). Towards sustainable society: Womenomics and women employment in Japan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1), 012103. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012103>
- Bakry, D. U. S. (t.t.). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Kencana.
- Breslin, J. W., & Rubin, J. Z. (Ed.). (1991). Negotiation Theory and Practice. Dalam Kolb, Deborah, & G. Coolidge, *Her Place at the Table*. Cambridge: Program on Negotiation at Harvard Law School.
- Cai, X. (2017). Shinzo Abe’s Reconciliation and Revisionism. *Reischauer Center*, 32.
- Chanlett-Avery, E., & Nelson, R. M. (2014). “Womenomics” in Japan: In Brief. 3–8.
- Coleman, L. (2016). Will Japan “Lean In” to Gender Equality? *US-Japan Women’s Journal*, 49(1), 3–25.
- Coleman, L. (2017). Japan’s Womenomics Diplomacy: Fighting Stigma and Constructing ODA Leadership on Gender Equality. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/S1468109917000147>

- Edstrom, B. (2007). *The success of a successor: Abe Shinzo and Japan's foreign policy*. Institute for Security and Development Policy.
- Florea, Natalie, Brown, S., Butler, M., & Hernandex, M. (2003). *Negotiating from Mars to Venus: Gender in Simulated International Negotiations* (Vol. 24, hlm. 226–248). Simulation Gaming.
- Flower, P. R. (2018). Women in Japan's Ministry of Foreign Affairs. Dalam *Gendering Diplomacy and International Negotiation* (hlm. 139). The Author(s).
- Foreign Policy Magazine. (t.t.). Akie Abe Speaks Her Own Mind to Give Women A Voice. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/sponsored/japanus/akie-abe-speaks-her-own-mind-to-give-women-a-voice/>
- Galli, G. (2016, September). *Critical analysis of Abe Shinzō's "womenomics."* [https://www.academia.edu/31152864/Critical\\_analysis\\_of\\_Abe\\_Shinz%C5%8Ds\\_womenomics](https://www.academia.edu/31152864/Critical_analysis_of_Abe_Shinz%C5%8Ds_womenomics)
- Government Offices of Sweden. (2015). *Swedish Foreign Service Action Plan for Feminist Foreign Policy 2015-2018*. <http://www.government.se/contentassets/b799389a0e06493f86c63a561e869e91/action-plan-feminist-foreign-policy-2015-2018>
- Harris, T. S. (2020). *Iconoclast: Shinzo Abe and the New Japan*. Oxford University Press.
- Hasunuma, L. (2015). Gender Gaiatsu: An Institutional Perspective on Womenomics. *University of Hawai'i Press*, 48, 79–114.
- Hasunuma, L. & Asia Centre. (2017). *Political targets: Womenomics as an economic and foreign relations strategy*. [https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/political\\_targets\\_womenomics\\_2017\\_hasunuma.pdf](https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/political_targets_womenomics_2017_hasunuma.pdf)
- Hays, J. (2016). *Shinzo Abe: His Life, Wife, and Second Stint as Prime Minister of Japan*. <http://factsanddetails.com/japan/cat16/sub110/item2879.html>.
- Hein, P. (2015). Leadership and Nationalism: Assessing Shinzo Abe. Dalam *Asian Nationalism Reconsidered* (hlm. 83–91). Routledge. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=l2pACwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA83&dq=shinzo+abe+%22leadership+and+nationalism%22&ots=OfGPivYhnH&sig=MmQtLeGCaIzCP163vS6KPNrjPw&redir\\_esc=y#v=onepage&q=shinzo%20abe%20%22leadership%20and%20nationalism%22&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=l2pACwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA83&dq=shinzo+abe+%22leadership+and+nationalism%22&ots=OfGPivYhnH&sig=MmQtLeGCaIzCP163vS6KPNrjPw&redir_esc=y#v=onepage&q=shinzo%20abe%20%22leadership%20and%20nationalism%22&f=false)
- Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24(1). <https://doi.org/10.2307/2600126>
- K., M., H., S., & Y., U. (1999). *Womenomics: Japan's Hidden Asset*. Goldman Sachs Japan Portfolio Strategy. <https://www.goldmansachs.com/insights/investing-in-women/bios-pdfs/womenomics-pdf.pdf>
- Kettler, S. (2020). *Shinzo Abe*. Biography. <https://www.biography.com/political-figure/shinzo-abe>
- Krippendorff, K. (1991). *Content Analysis: An Introduction on its Methodology*. SAGE Publications.

- Kurnia, L. F. (2019). *Faktor Idiosinkratik Dalam Kebijakan Luar Negeri Donald Trump Terhadap Program Nuklir Iran*.  
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10706>
- Liddle, J., & Nakajima, S. (2000). *Rising Suns, Rising Daughters: Gender, Class and Power in Japan*. Zed Books.
- Mai, L. (t.t.). *Women And Work In Contemporary Japan: Deconstructing The “Crisis” Of The Gender Order*. 100.
- Macnaughtan, H. (2015). Womenomics for Japan: Is the Abe policy for gendered employment viable in an era of precarity? *The Asia-Pacific Journal, Volume 13*(Issue 12).
- Parsons, S. (2020, November 11). *Is gender still on the agenda in Japan?* East Asia Forum.  
<https://www.eastasiaforum.org/2020/11/11/is-gender-still-on-the-agenda-in-japan/>
- Pilling, D. (2006). *The Son Also Rises*. <https://www.ft.com/content/2a18ead2-43b7-11db-8965-0000779e2340>
- Research, C. E. (2021). *Shinzo Abe Fast Facts*. CNN.  
<https://www.cnn.com/2013/01/10/world/asia/shinzo-abe---fast-facts/index.html>
- Rosenau, J. N. (2006). *The Study of World Politics: Theoretical, and Methodological Challenges*. Routledge.
- Rich, M., & Ueno, H. (2020, September 13). Shinzo Abe Vowed Japan Would Help Women ‘Shine.’ They’re Still Waiting. *The New York Times*.  
<https://www.nytimes.com/2020/09/13/world/asia/japan-women-abe.html>
- Saaler, S. (2016). Nationalism and History in Contemporary Japan. *The Asia-Pacific Journal, 14*(20), 17.
- Saputra, A. (2016). *Womenomics sebagai Mekanisme Peningkatan Peran Perempuan di Jepang: Studi Kasus Kebijakan Pro-Gender di Era Pemerintahan Shinzo Abe Periode Ke-2* [Universitas Sebelas Maret]. <https://eprints.uns.ac.id/25499/>
- Sato, F. (2021). Trends in gender studies within Japanese sociology. *International Sociology, 36*(2), 219–230. <https://doi.org/10.1177/02685809211005353>
- Sekiguchi, T. (2015). *Michelle Obama Unveils US-Japan Push for Girls’ Education*. The Wall Street Journal. <http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/03/19/michelle-obama-unveils-u-s-japan-push-for-girls-education/>
- Setiawaty, D. A., & Virgianita, A. (2019). Implication of Womenomics on the Relationship between Female and Male Workers in the Professional and Social Environment: A Preliminary Study. *University of Indonesia*.
- Shibuichi, D. (2017). The Japan Conference (Nippon Kaigi): An Elusive Conglomerate. *East Asia, 34*(3), 179–196. <https://doi.org/10.1007/s12140-017-9274-1>
- The Famous People. (t.t.). *Who is Shinzō Abe? Everything You Need to Know*. The Famous People. Diakses 6 Juni 2022, dari <https://www.thefamouspeople.com/profiles/shinz-abe-6877.php>
- The Japan Times. (2006). *Political career of Shinzo Abe*.  
<https://www.japantimes.co.jp/news/2006/09/21/national/political-career-of-shinzo-abe/>

- The World Bank. (2021). *Labor Force Participation Rate, Total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)*. The World Bank.  
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.ZS>
- UN News. (2013). *Japanese leader advocates 'womenomics' in address to UN General Assembly*.  
<https://news.un.org/en/story/2013/09/450912>
- Website Resmi Perdana Menteri Jepang. (2013, September 26). *Address by Prime Minister Shinzo Abe, at The Sixty-Eighth Session of The General Assembly of The United Nations (Speeches and Statements by Prime Minister)*. Prime Minister of Japan and His Cabinet.  
[https://japan.kantei.go.jp/96\\_abe/statement/201309/26generaldebate\\_e.html](https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201309/26generaldebate_e.html)
- Website Resmi Perdana Menteri Jepang. (2014, September 13). *Speech by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the High Level Round Table, World Assembly for Women in Tokyo: WAW! Tokyo 2014*.  
[https://japan.kantei.go.jp/96\\_abe/statement/201409/waw140913.html](https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201409/waw140913.html)
- Website Resmi Perdana Menteri Jepang. (2017). *Speech by Prime Minister Shinzo Abe at the World Assembly for Women (WAW! 2017) (Speeches and Statements by the Prime Minister)*  
[https://japan.kantei.go.jp/98\\_abe/statement/201711/01WAW.html](https://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/201711/01WAW.html)
- Yomiuri Shimbun (Direktur). (2015). *Dalam TV Ads to Promote Japan Abroad*.